

penguasa di Cina daratan¹. Insting manusia yang ingin menyelamatkan diri, akhirnya menuntun kaum tersebut untuk membuat pilihan bagi dirinya. Meninggalkan tanah air semata-mata untuk bertahan dan memulai hidup baru dengan harapan yang terselip, bahwa keadaan di tanah rantau akan lebih baik.

Keberadaan suku bangsa Tionghoa di Nusantara lebih ditentukan oleh berbagai penemuan. Dari barang pecah belah seperti tembikar, guci dll. Akulturasi budaya Tionghoa-Nusantara sah dikatakan memiliki peranan penting dalam perjalanan sejarah negeri Indonesia. Bisa dicontohkan seperti peninggalan berbentuk dekorasi mesjid dan kelenteng di Semarang, diperuntukan sebagai penghormatan pada Laksamana Ceng Ho. Pertautan antara Chinese daratan dan Nusantara bukan hal yang baru, dapat terlihat dari pemerintahan kaisar Wang Ming dari dinasti Han(1-6 SM), Tiongkok telah mengenal Nusantara yang disebutnya Huang Tse².

Diaspora suku bangsa Tionghoa meliputi hampir seluruh bagian dunia dan Nusantara adalah salah satunya. Kebutuhan akan buruh murah di Sumatra Utara, pertambangan di pulau Bangka, Bliton, Kalimantan menjadi stimulus bagi suku bangsa Tionghoa untuk datang ke Indonesia. Nasib mereka kurang lebih sama ketika pertama kali datang yaitu bekerja sebagai buruh-buruh murah dalam berbagai usaha perkebunan dan pertambangan. Dalam konteks Kalimantan bisa dikatakan sebagai penambang emas. Gambaran paling sederhana ketika seseorang memilih daerah baru, maka dengan segala daya upaya harus bisa bertahan hidup. Dominasi pemikiran "*untuk bertahan hidup*" membuat kaum

¹ Siahaan Harleem. 1994(Desember). *Konflik dan Perlawanan Kongsi Cina di Kalimantan Barat*(Prisma).LP3S. Jakarta. Hal 43.

² S. H. G. P. 2004. *Tionghoa Dalam Rangka Politik Ekseka* Jakarta hal 18

ini berusaha lebih untuk survive dan menjadi gejala wajar dari kaum pendatang, entah dari suku bangsa manapun. Lihatlah keuletan para transmigran dari Jawa ketika berada di Lampung, Madura di Kalimantan sehingga terjadi pertikaian antar suku diakibatkan perebutan lahan ekonomis. Bukan sesuatu yang istimewa ketika mereka mau jadi apa saja dan rajin, karena hanya senjata ini saja yang mereka miliki. Posisi yang ditempati dalam bidang perekonomian biasanya berperan sebagai pedagang perantara. Sebagian dari mereka besar karena membangun jaringan dengan penguasa lokal baik melalui birokrasi maupun pejabat militer. Pasca kolonial ditandai dengan melemahnya perusahaan Belanda. Mereka dapat naik peringkat untuk menggantikan posisi Belanda. Lebih agresif dan masyarakat migrasi melahirkan budaya rajin, hemat dan mengandalkan diri sendiri. Ditambah organisasi yang sanggup bermetamorfosis dengan lingkungan sosial. Dalam banyak hal Belanda membutuhkan kaum Tionghoa untuk menjangkau pedesaan sebagai para produsen bahan baku. Selain itu diperkerjakannya juga sebagai buruh dalam berbagai perkebunan dan menjadi mandor dalam usaha-usaha Eropa³.

Bukan berarti non Chinese malas, karena stigmatisasi malas bagi kaum pribumi tidak lepas dari kepentingan pihak kolonial. Sebagai pembenaran bagi penjajahan dan upaya lepas dari tanggung jawab kemiskinan serta penderitaan akibat sistem eksploitatif yang telah mereka bangun⁴. Kedatangan Tionghoa

³ Skinner William G dkk (1979). *Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia*. Gramedia Jakarta. Hal 2 dalam buku

⁴ Sampai sekarang bahasa malas pun masih mapan digunakan penguasa untuk menenangkan rakyatnya, yang lebih ironis sekarang digunakan adalah dalil keagamaan agar dapat meruntuhkan keyakinan masyarakat terhadap hal-hal di atas. Contoh paling sederhana mengenai

ketanah Sumatra diakibatkan rasa ketinggalan teknologi. Pengembangan teknologi dirasa penting bagi maksimalisasi proses pertambangan serta penggalian yang berada di pulau Bangka. Tambang ini diperoleh VOC setelah melakukan transaksi pembelian dengan sultan Palembang. Pasca pembelian, VOC mengirimkan agen untuk merekrut orang Tionghoa agar bisa dijadikan penambang, biasanya dari daerah Cina Selatan⁵. Dalam beberapa fase sejarah, suku bangsa Tionghoa bisa dikatakan menempati kelas dua dalam strata sosial masyarakat, pada masa penjajahan Belanda kedudukan mereka ditengah antara Eropa dan Bumi Putra, menjadi semacam penghubung diantara keduanya dalam berbagai keperluan. Paling utama biasanya adalah ekonomi. Dengan posisi tersebut hak-hak yang biasa dimiliki oleh lapisan atas maupun bawah tidak bisa dimiliki. Semisal berbeda dengan hak yang dimiliki warga Belanda, untuk mendapatkan pendidikan melalui sekolah formal cukup sulit. Masalah keamanan juga menjadi pertimbangan tersendiri karena kurang mendapat perlindungan dari aparat keamanan Belanda. Perbedaan dengan bumi putra adalah tidak diperkenankan untuk memiliki tanah walaupun pada akhirnya peraturan tersebut dihapus. Beberapa hal diatas dapat menjadi bukti mengambangnya posisi dan menyebabkan tidak adanya kepastian⁶. Kaum ini dapat dikatakan telah kehilangan hak politik walaupun memiliki keamanan dalam perekonomian. Penguasaan bukit-bukit tertentu di dalam perekonomian sementara jurang kemiskinan sosial semakin melebar. Menjadi penyebab tumbuh suburnya

ketidak malasan kita adalah simbok di Yogyakarta yang pagi-pagi sudah jalan ke pasar tapi sampai sekarang mereka tidak pernah mengalami kenaikan status ekonomi.

⁵ Setiono G Beny. 2004. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*.Elkasa.Jakarta hal 215-216.

pandangan negatif mengakibatkan adanya generalisir terhadap keseluruhan suku bangsa Tionghoa.

Pandangan mengenai kehilangan hak politik dapat dipastikan dialami seluruh manusia yang terjajah dalam era kolonial Belanda dan dimana saja. Pemerintahan penjajah Belanda mencoba menjawab tuntutan rakyat dengan membentuk Volkskraad. Sekedar lipstik pemanis belaka karena dewan ini hanya sebetulnya lembaga penasihat tanpa bisa berbuat apa-apa terhadap kebijakan yang diskriminatif. Era ketika SI lahir dalam tubuh masyarakat sehingga memperoleh banyak pengikut dan dipandang memiliki potensi subversif bagi pemerintah Belanda. Berbicara bagaimana tanpa perlunya surat dari pengadilan dapat melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai dapat memprovokasi massa untuk terjun dalam aksi-aksi reli massa.

Adanya pandangan mengenai pribumi dan non pri menjadi kendala tersendiri, dari pemahaman tersebut timbul pengkotak-kotakan dalam tubuh rakyat. Pemahaman mengenai non pri lebih merujuk pada suku bangsa Tionghoa⁷.

Adanya pandangan salah kaprah dalam memandang bahwa Tionghoa adalah satu kesatuan yang utuh dan akan saling tolong menolong. Sifat tolong menolong dalam artian negatif menjadi penyebab bagi suburnya KKN, mengakibatkan oligarki bisnis. Pandangan oligarki dalam berbisnis tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Apakah salah untuk mewarisi dan melindungi bisnis

⁷ Standarisasi mengenai pribumi dan non pribumi tidaklah jelas, Orang Indonesia aslipun tidak memiliki kejelasan konseptual, siapakah yang sebenarnya paling pantas untuk dikatakan orang Indonesia asli? dalam konteks etnik Chinese mereka yang telah tinggal dan beranak pinak serta

yang dimiliki? Menjadi salah ketika melakukan pencaplokan dan pembunuhan karakter dalam melakukan persaingan bisnis dengan semena-mena apalagi dengan berbagai ancaman intimidasi. Pandangan masyarakat mengenai satu suku akan bantu sesamanya tidak sepenuhnya salah. Nampaknya dalam dunia bisnis semboyan tersebut sudah mulai ditinggalkan, yang tersisa adalah ketika kita sama-sama percaya dan saling menguntungkan(bertemunya kepentingan) maka negosiasi akan tetap berjalan. Tradisi kolektif atas dasar persekawanan dalam dunia bisnis merupakan sesuatu yang lumrah. Kita sering melihat teman bantu teman, saudara bantu saudara. Siapa yang tega melihat kawan ataupun teman menderita.

Tidak benar ketika kita mempersepsikan bahwa suku bangsa Tionghoa adalah satu kesatuan yang utuh. Banyak pembagian dan terfragmentasi dalam banyak suku semisal Hakka, Fu Kien, Hokkian DLL. Ketika pertama kali menginjak tanah harapan. Parameter suku menjadi patokan dalam memilah persekutuan. Fargmentasi melahirkan banyak perkumpulan-perkumpulan dan sebenarnya tidak juga dapat membuat mereka bersatu kecuali ada permasalahan khusus yang dapat memaksa dapat membuat mereka bersatu. Seperti di Kalimantan, dikarenakan sistem pedesaan yang mereka pahami di negeri asalnya maka sistem tersebut pula yang mereka praktekkan di tanah baru. Sistem tersebut biasanya berlandaskan kekerabatan dan kekeluargaan. Serta dibentuknya kongsi sebagai sebuah wadah organisasional sebagai lembaga yang dipandang dapat menyelesaikan konflik internal maupun eksternal. Kongsi-kongsi ini tumbuh

subur dan kadang timbul pertikaian diantar mereka⁸. Dalam melakukan analisa dan pembagian mengenai Tionghoa lebih banyak ilmuwan mengkategorikan pada totok ataupun peranakan. Totok adalah generasi pertama dari Tiongkok ataupun generasi kedua yang keturunannya belum melakukan perkawinan campuran serta tetap memiliki kedekatan dengan budaya Tiongkok⁹. Sementara peranakan adalah yang telah mengalami akulturasi budaya dengan lingkungan sekitar bahkan pada beberapa hal telah mengalami penurunan identitas budaya. Dalam melakukan analisa kekinian dikotomi tersebut dipandang sudah tidak memiliki relevansi diakibatkan berkurangnya eksodus, ataupun bisa dikatakan menurun diakibatkan adanya PP No 10. Pembatasan terhadap ruang gerak suku bangsa Tionghoa pada tingkat pedesaan dan mengakibatkan eksodusnya suku bangsa Tionghoa ke Tiongkok(tanah nenek moyang) dengan harapan penerimaan yang lebih baik. Persepsi ini boleh untuk dikatakan salah. Suku Tionghoa Indonesia bisa dikatakan telah melakukan akulturasi budaya dengan berbagai suku tempat mereka tinggal. Sehingga diperlukan waktu panjang untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan baru.

Saat ini apabila kita mencoba melakukan pembedahan lebih mudah untuk melihat tempat dimana mereka tinggal, dari pada memperdebatkan Totok ataupun peranakan. Karena telah terjadi persenyawaan yang cukup tinggi diantara suku bangsa Tionghoa dan tradisi dimana mereka tinggal, walaupun tidak dipungkiri tetap ada cara-cara tradisional ataupun budaya lama yang masih diyakini dan dijalankan. Semisal Imlek dan Cap Go Meh yang tetap menjadi identitas

⁸ Siahaan Harleem. 1994(Desember). *Konflik Dan Perlawanan Kongsi Cina Di Kalimantan Barat*(Prisma).LP3S. Jakarta. Hal 45-47.

pembeda. Belum kita bicara tentang orientasi politik, pada masa pra kemerdekaan dan pergulatan menuju kemerdekaan. Kita dapat membedah mereka kedalam tiga golongan yang berhubungan dengan kedudukan Tionghoa di Indonesia ;

- Pegang teguh kebangsaan Tionghoa tetap tinggal seperti bangsa Tiongkok, tolak kawula Belanda dan berdaya upaya agar Tiongkok disini lebih rapat dengan tanah air bikin dirinya menjadi totok dan persatukan nasib dengan Tiongkok.

- Tinggal sebagai bangsa Tionghoa tapi minta dipersamakan sebagai Indonesia dengan segala hak tanggungan dan kewajiban, berdaya bikin maju negri ini yang dipandang sebagai tanah ibu dan persatukan nasib dengan penduduk Indonesia,

- Tetap tinggal jadi bangsa Tionghoa bikin hubungan kultural dengan Tiongkok tapi terima persamaan Ned Onderdaan schap yang sudah tidak dipungkiri lagi. Bekerja sama dengan pemerintah dan golongan lain buat kemakmuran di negri ini sambil bikin teguh kedudukan bangsa Tionghoa di Indonesia¹⁰.

Dalam perputaran ekonomi di masa pemerintahan Kolonial Belanda, suku bangsa Tionghoa menempati posisi golongan perantara diantara Belanda dan Bumi putra. Biasanya yang termasuk dalam golongan ini adalah yang pernah menjalani pendidikan Belanda dan rata-rata peranakan.

Berbicara perekonomian tidak bisa kita lepaskan sistem yang dibangun pada saat itu yaitu kapitalisme pinggiran, sistem yang berbeda dari negeri asalnya

¹⁰ G. N. S. Lee, 2005, *Revisiting Politik Etnis Tionghoa: 1900-2002*, LP3S, Jakarta, Hal 95

dan memiliki karakteristik tersendiri. Corak kapitalismenya sama, dimana modal, buruh, pengetahuan dan keahlian melakukan eksploitasi terhadap sumber alam dan diolah untuk menjadi hasil produksi sehingga dapat memenuhi tuntutan pasar. Istilah pinggiran adalah, keuntungan dari hasil produksi tersebut tidak diakumulasikan di dalam lingkaran tapi dibawa keluar. Struktur kapitalisme pinggiran selalu menciptakan ekonomi yang berat sebelah dan berorientasi keluar dimana kegiatan terpusat pada bidang ekstra aktif dan ekspor, sehingga tidak mendorong industrialisasi¹¹. Pada masa kolonial Belanda lahirlah THKK (Tiong Hua Hui Koan) sebagai upaya unifikasi bagi peranakan dan kaum totok. Organisasi lebih berorientasi pada bidang pendidikan. Dapat diketahui bahwa persaingan peranakan yang lebih dekat dengan Belanda dan Tionghoa totok berorientasi pada kaisar Qing mengalami kontradiksi yang cukup dalam. Adanya hinaan seperti peranakan bukan Chinese dikarenakan telah lupa tanah leluhur masih menjadi pergunjingan yang cukup panas. Organisasi ini dapat dikatakan cukup berhasil dikarenakan sedikit bisa meredam kontradiksi diantara suku bangsa Tionghoa dan keberadaan THKK berhasil menyita perhatian dari pemerintah Belanda. Sebagai jawaban pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah Chinese berbahasa Belanda. Di beberapa daerah, THKK berhasil melahirkan generasi pembangkang, yang dapat dikatakan menganulir kebijakan dari Belanda. Potensi-potensi tersebut yang menimbulkan kekhawatiran dari

¹¹ Bulkin Farhan. 1984. *Kapitalisme, Golongan Menengah Dan Negara : Sebuah Catatan Penelitian*(Priema) LP3S, Jakarta. Hal 6-7

Belanda. Sehingga perlu dicegah unifikasi dari suku bangsa Tionghoa¹². Implikasi pendirian sekolah Belanda ternyata cukup berhasil. Perpecahan kembali terjadi muncul berbagai persaingan diantara lulusan Belanda dan lulusan dari THHK.

Pada masa pendudukan Jepang terjadi penurunan eskalasi perekonomian yang dulu dipegang oleh peranakan. Pada saat Jepang berkuasa, totok menjalani posisi perantara dengan menjadi penyeludup¹³. Naiknya dominasi kaum totok tidak dapat dilepaskan dari semakin bagus dan terjaminnya pelayaran. Dahulu ketika emigran dari Tiongkok daratan pertama kali datang ke Nusantara biasanya hanya kaum lelaki. Diprediksi menjadi salah satu penyebab mudahnya elaborasi dengan kaum pribumi. Maka terjadi perkawinan campuran diantara Tionghoa dengan penduduk sekitar. Ketika fasilitas dalam pelayaran dirasa semakin maju maka tidak hanya kaum lelaki saja tapi turut serta membawa istri serta keluarga. Kemungkinan untuk hidup bersama di Hindia Belanda, mengakibatkan naiknya populasi kaum totok dan mulai mengeser kaum peranakan. Pada masa kemerdekaan posisi tidak jauh berubah, era dimana Soekarno berkuasa posisi suku bangsa Tionghoa tetap menjadi kelas dua. Munculnya PP 10 memperoleh pengesahan menyebabkan kegiatan terbatas hanya pada tingkat perkotaan.

Partisipasi dalam iklim demokrasi cukup dinamis dengan adanya organisasi seperti BAPERKI yang dirasa cukup menjadi manifestasi kepentingan. Serta banyaknya individu yang terlibat didalam politik seperti Tan Po Goan (PSI), Siouw Giok Tjhan (PKI). Pada masa Soekarno, kita dapat melihat sistem ekonomi

¹² Kelihatannya sistem pendidikan yang dihasilkan oleh kolonialis Belanda justru melahirkan sebuah pemahaman perlawanan dan salah satunya melalui bidang pendidikan. Entah disengaja ataupun tidak disengaja justru melahirkan pemahaman pan Chinese.

¹³ Yang Peck Twang. (2004). *Elite Bisnis Cina Di Indonesia Dan Masa Transisi Di Kemerdekaan 1940-1950* Niagara. Yogyakarta. Hal 245-246

komparatif setempat. Upaya penelitian dilakukan dipusat, kegiatan padat kerja dilakukan di kawasan pinggiran¹⁴.

Sejarah partai politik Indonesia ditandai dengan berdirinya PNI sebagai manifestasi nasionalisme yang pada saat itu begitu megebu. Dalam manifestasinya masih tersisip sebuah diskriminatif semisal dalam AD/ART partai yang mengatakan bahwa orang asing sebagai anggota luar biasa dan bukan anggota penuh. Keputusan ini berlaku hampir pada seluruh partai kecuali oleh PKI yang pada saat itu bergerak di bawah tanah dan Indische Party. Hal-hal tersebut yang membuat beberapa individu Tionghoa pro Indonesia mulai berfikir perlu untuk membentuk organisasi politik sendiri. Atas perakarsa Sin Tit Pao dan dukungan Soeara Oemoem dan organ resmi Persatoean Bangsa Indonesia. Maka terjadilah rapat yang dipimpin oleh Liem Koen Hian dan terbentuklah Komite Van Acie Persatoean Bangsa Indonesia untuk memboikot pertandingan sepak bola. dikarenakan para wartawan tidak diberikan ijin khusus dalam peliputan. Karena persoalan politik pada saat itu berbagai macam bentuk boikot bisa menjadi sebuah masalah yang dipandang cukup serius¹⁵. Disusul pada tahun 1932 di Surabaya Liem Koen Hian mendeklarasikan partai Indonesia Tionghoa sebagai partai Tionghoa yang mempunyai kiblat ke Indonesia. Dalam perjalannya PTI dituduh ovunturir karena tidak terlibat dalam GAPI, yang dibentuk karena pandangan terhadap Jepang yang sudah mulai nampak. Ketidak terlibat ini bukan dikarenakan tidak sepakat atas kemerdekaan tapi dikarenakan tidak ingin menjadi anak tiri Republik Indonesia dengan statusnya sebagai anggota luar biasa.

¹⁴ Chalmer Ian.(1996). *Konglomerasi*. Jakarta . LP3S. Hal 65.

dengan memberikan keistimewaan pada para pengusaha¹⁸. Bermunculan sederet nama pengusaha Tionghoa.

Sedikit kita coba menyoroti peranan Tionghoa dalam perekonomian, adanya gambaran bahwa Tionghoa adalah para kapitalis yang sebenarnya di negeri ini. Persepektif tersebut tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Karena tidak seluruh suku bangsa terlibat bahkan banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Bicara kapitalis bicara bahwa modal dapat menguasai pengambilan kebijakan. Benar bahwa suku bangsa Tionghoa dalam beberapa hal menguasai bukit perekonomi yang ada. Sementara dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan sangatlah lemah. Tidak juga dapat dipungkiri bahwa ada beberapa individu yang berhasil membangun relasi dengan beberapa pejabat teras. Hubungan yang terbangun berkisar hanya pada kegiatan bisnis semata melalui berbagai perlindungan serta kemudahan, tidak sampai pada tahapan memberikan pengaruh pada level kebijakan negara¹⁹. Kurang lebih bisa dikatakan hampir semua pengusaha Indonesia memiliki kelemahan yang sama. Tidak seperti idealnya wiraswasta yang memiliki kemandirian. Pengusaha Indonesia dipandang mengalami ketergantungan akut dengan Negara dan bisa dikatakan telah kehilangan kemandirianya²⁰. Mengakibatkan pada dataran politik mereka tidak mempunyai kekuatan apapun bahkan mengalami pengebirian. Terjadinya pengebirian diakibatkan dari hilangnya independensi serta menguatnya peranan negara melalui birokrasi yang juga menjelma menjadi pengusaha. Ada beberapa

¹⁸ Masoed Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik ; Orde Baru 1966-1971*.LP3S. Jakarta. Hal 121-122.

¹⁹ Mackie.JAC. 1984. *Harta Dan Kuasa Dalam Masa Orde Baru (Prisma)* LP3S. Jakarta. Hal 31.

²⁰ Ini bukan upaya generalisir , tapi mayoritas pengusaha dengan label nasional diharuskan memiliki relasi dengan para pejabat. Agar dapat dipermudah segala urusan.

usaha pemerintahan nasional Indonesia untuk membangun kelas menengah pengusaha pribumi. Pada awal penyerahan kedaulatan Indonesia telah berkembang dominasi pemikiran nasionalisme ekonomi. Pada saat kabinet pertama Mohammad Natsir dari Masyumi. Pemerintah melahirkan program RUP(Rancangan Urgensi Perekonomian). Program ini dipersiapkan oleh Dr Soemitro Djojohadikusumo(mentri perdagangan dan industri) bersama direktur perdagangan dan industri Dr Saroso Wirodiharjo. Kebijakan tersebut dimaksud untuk membimbing pemerintah dalam kegiatan industri dan pertanian serta memungkinkan untuk melakukan pengawasan pembentukan perusahaan baru. Melakukan konsolidasi usaha industri dengan cara mengaitkan industri besar dengan industri kecil terutama di daerah pedesaan. Bahkan dalam jangka panjang mengurangi dominasi asing. Pemerintah akan menguasai industri vital yang baru seperti; pabrik untuk pertahanan kimia dasar, pabrik semen, instasi pembangkit tenaga, instasi irigasi dan perusahaan angkutan. Pemerintah menguasai industri vital, pemerintah akan menyediakan modal sekurang-kurangnya 50% dan akan memegang dua pertiga saham istimewa serta mayoritas dukungan di dalam dewan direksi. Pemerintah akan memberi dukungan pada industri di pedesaan. Industri menengah dan besar akan didirikan dan dibagi dalam proyek jangka pendek atau panjang. Dalam RUP modal asing tetap diperbolehkan ada untuk memainkan peranan lebih aktif dalam industri tidak penting. Ketika pengusaha domestik berkeinginan untuk berperan maka modal asing dibentuk perusahaan campuran untuk menjembatani keduanya. Modal Indonesia harus memiliki proporsi lebih

mayoritas dalam dewan direksi, pemerintah akan mengucurkan modal untuk menjembatani kesenjangan yang dianggap mungkin ada. Anggaran dasar perusahaan harus memuat ketentuan dalam peralihan saham dari tangan asing ke tangan orang Indonesia. Kewajiban melatih tenaga kerja wajib dilaksanakan oleh keberadaan perusahaan asing. Apabila modal Indonesia tidak berminat terhadap usaha yang dijalankan asing maka perusahaan asing diharuskan untuk mengalihkan modal asing secara bertahap dan mempersiapkan staff untuk pengalihan fungsi²¹.

Bagian integral dari RUP adalah program Benteng. Gagasan utama dari program tersebut adalah mendorong importir nasional agar mampu bersaing dengan importir asing. Kebijakan yang mencakup program benteng kurang lebihnya adalah pembatasan impor, pemberian lisensi impor hanya untuk importir Indonesia, pemberian kredit. *Pertama*, Bantuan diberikan pada sektor impor karena hanya memerlukan investasi minim bagi biaya eksploitasi. Dapat mencakup banyak jenis barang yang mempunyai pasar pembeli. Sektor impor dirasa tidak memerlukan ketrampilan teknis tinggi bisa dilakukan dengan ketrampilan sederhana. Berbeda dengan impor selain pendanaan dibutuhkan stimulus lain seperti pembangkitan kepercayaan diri ketika bersaing dengan perusahaan asing yang dapat dipastikan jauh lebih mapan. *Kedua*, perusahaan Belanda yang sudah mapan memanfaatkan berbagai sektor impor yang menguntungkan tersebut, sebelum memperluas pada sektor perekonomian lain. perusahaan besar Belanda didasarkan atas sistem kuota pada tahun 1933. pasca

²¹ Muhaimin Yahya(1991). *Bisnis dan Politik LP3S*. Jakarta hal 25-26.

kemerdekaan kedatangan kembali perusahaan tersebut didasarkan atas dasar hak historis. Hak historis ini menyebabkan kejengkelan dari golongan elit yang baru lahir. *Ketiga*, arti penting impor bagi perekonomian Indonesia. Sejak zaman kolonial Indonesia mengekspor bahan mentah sementara kebutuhan atas barang konsumsi serta barang modal dipenuhi melalui impor. Seperti perusahaan batik, tekstil dan rokok. Banyak pejabat Indonesia yakin apabila sektor penting ini tidak dikuasai oleh importir dalam negeri kemerdekaan ekonomi tidak akan pernah tercapai. *Keempat*, kekuasaan pemerintah lebih besar atas kegiatan impor dari pihak manapun²².

Untuk mendapatkan bantuan dalam program benteng para importir harus memenuhi berbagai ketentuan dari pemerintah. Persyaratan ini tidak baku karena dalam perjalannya telah dilakukan berbagai revisi. Para importir tersebut harus baru. Mempunyai status hukum sebagai badan hukum atau perseroan terbatas, atau suatu kongsi. Mempunyai modal minimum sebesar Rp 100.000,00 atau sekitar \$ 26.000,00 (nilai tukar rupiah pada saat itu adalah Rp3,80 = \$1). Mempunyai kantor yang luas dengan tenaga kerja full time. Memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam perdagangan dan berbagai usaha lain. ketentuan tersebut mengalami perubahan kecil pada tanggal 30 Mei 1953. ketika pemerintah mengumumkan semua importir harus mendaftarkan diri kembali. Revisi tersebut berupa direktur tidak boleh memegang lebih dari satu jabatan untuk mencegah jatuhnya lisesi impor pada satu orang. Persyaratan modal diubah menjadi Rp250.000,00 atau sekitar \$22.000,00. kekayaan perusahaan minimal harus

²² Ibid hal 29-31.

Rp1.000.000,00 atau \$88.000(kurs rupiah Rp11,40=\$1. untuk diakui sebagai perusahaan benteng, dalam permodalan perusahaan impor harus dimiliki bangsa Indonesia asli pada tanggal 30 Mei 1953 terjadi pergeseran dalam peraturan. Bahwa modal harus dimiliki orang asli sampai limit 100% dan saham tidak boleh dijual kepada orang asing²³.

Kerumitan birokrasi menjadi kendala tersendiri. Pada saat rezim Soeharto berkuasa, pengusaha diwajibkan memiliki lisensi khusus agar dapat mendirikan usaha dan sangat ketat sifatnya. Sistem lisensi dapat membuat para pengusaha untuk tetap loyal pada pemerintah demi terjaganya keamanan bisnis. Dengan kekuasaan lisensi, pemerintah maupun birokrasi dapat menyeleksi bidang usaha dan para pengusahanya. Ditambah kebanyakan para pengusahanya adalah bekas birokrat dan petinggi ABRI serta anak-anaknya. Pesimis ketika kita berharap membayangkan orientasi untuk melahirkan pemikiran yang tidak sejalan dengan pemerintah. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka sedikit demi sedikit pola konsumsi mengalami perubahan, ditambah pengaruh media yang semakin gencar. Maka terlahir pula pola konsumtif yang terbilang cukup tinggi. Kelas menengah dipandang menjadi tonggak dari budaya baru, adanya orientasi yang menyebabkan mereka terasing dari kehidupan sosial. Tingginya pola konsumsi menjadi penyebab keterasingan, dikala rakyat banyak masih hidup pas-pasan bahkan kekurangan. Kelas menengah justru menampilkan gaya hidup yang sangat kontras. Masyarakat melihat mereka tidak lebih sebagai OKB (Orang Kaya Baru) dan bukan sebagai kelas menengah yang membawa arus perubahan

seperti di negeri asal. Keberadaan kelas menengah di masa orde baru tidak bisa lepas dari fenomena boom minyak yang terjadi. Ketika negara pengekspor minyak(OPEC) menaikkan harga sebagai respon terhadap serangan Israel terhadap Mesir. Ledakan tersebut menyebabkan negara mendapatkan penerimaan dana segar. Dalam periode 1974-1978 penerimaan negara mengalami kenaikan dari 957 miliar menjadi 2.309 miliar²⁴. Ada dua periode boom oil, pada periode kedua dari Rp 4.260 miliar menjadi Rp 11.144 miliar. Tidak lama setelah itu negara mulai melebarkan pembangunannya. Biaya pembangunan bertambah dari 20% pada tahun 1968 menjadi 56% pada tahun 1976. Biaya pembangunan tersebut didapat dari tabungan pemerintah yang diperoleh dari pajak termasuk minyak didalamnya serta dari pinjaman asing²⁵. Pendapatan dadakan akibat oil boom tersebut dipandang sebagai potensi untuk mengurangi ketergantungan dari modal asing. Secara otomatis akibatnya adalah negara menjadi aktor dominan dalam pembangunan perekonomian dengan cara menjadi investor dalam berbagai proyek pembangunan. Negara secara serius mendorong kehadiran para kapitalis pribumi maupun keturunan terutama sekali bagi mereka yang memiliki koneksi didalam pemerintah. Joint antara perusahaan asing dengan pengusaha lokal. Selain karena memiliki modal pengusaha asing lebih cenderung memilih patner mereka yang telah memiliki koneksi secara politik. Privatisasi yang dilakukan rezim lebih pada mengalihkan sektor ekonomi negara kepada swasta. Bahkan bagi mereka yang memiliki koneksi bisa mendapatkan dengan harga murah dan tidak transparan. Penggalangan sumber dana alternatif dengan mengubah bank negara menjadi

²⁴ Hiarji Eric(2005) *Materialisme Sejarah Keistimewaan Soeharto*. IRE Yogyakarta. Hal 65

bank komersial. Ini menguntungkan para kapitalis karena mendapat sumber daya yang melimpah. Karena peminjaman dana tersebut tidak lepas dari koneksi maka lebih sering ada penyelewengan seperti kredit macet yang dilakukan oleh Edy Tanzil²⁶

Sebab lain lemahnya kelas menengah adalah modal asing, mereka tetap ingin mempertahankan dominasi dengan tidak melakukan alih teknologi. Jadilah kelas menengah Indonesia yang miskin teknologi. Dalam kerja sama modal asing dengan dalam negeri posisi yang didapat hanyalah sekedar junior partner. Perannya tidak signifikan dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Dalam analisa entrepreneur sejati kedudukan junior partner hanyalah sekedar pemanis dan membuat gelisah tapi bagi kelas menengah Indonesia bukan sebuah masalah besar, karena mereka sebenarnya bukan entrepreneur sejati. Paling penting sekedar dapat membiayai tingginya pola konsumtif. Kaum intelektual yang terbiasa dengan ide-ide segar pun terbawa dalam arus, kehilangan keberanian untuk menolak dan melawan arus. Bahkan yang terjadi adalah penghalusan bahasa semisal adalah "*proyek pembangunan belum berhasil*". Implikasi yang timbul adalah kecacatan dan bisa diperbaiki, lain hal dengan berkata tidak berhasil. Sehingga bisa diinterpretasikan sebagai proyek ini adalah kesalahan, mulai dari konsep sampai pada eksekusi. Zaman orde baru adalah zaman yang tidak berpihak bagi manusia berorientasi berbeda karena dapat dipastikan

tidak trend²⁷. Beberapa kritik diajukan terhadap kelas menengah Indonesia seperti *Jumlahnya terlalu kecil sehingga tidak mungkin melakukan perubahan*(seakan-akan perubahan sosial di dunia ditentukan oleh orang yang menghendaknya). *Kelas menengah Indonesia terlampaui tergantung dengan keberadaan negara, egois dan oportunistik*(seakan-akan perubahan sosial selalu dipimpin oleh orang baik hati dan tidak sombong). *Industrialisasi di Indonesia tidak menyamai industrialisasi di Eropa*(apakah harus sama industrialisasi di Eropa dengan di Asia)²⁸.

Ketika kita komparasikan dengan pola kelas menengah luar negeri akan mengalami perbedaan yang sangat jauh. Tidak seperti kapitalisme mapan internasional yang sanggup mendatangkan Condy sehingga pemerintah Indonesia bertekuk lutut dan menghadiahkan blok Cepu agar dapat diolah oleh Exxon. Sebuah bukti nyata bahwa adanya daya tawar sehingga dapat memaksa pemerintah nasional untuk terlibat dalam kepentingan jaringan ekonomi internasional.

Dalam konteks Indonesia sendiri yang bisa dilakukan hanya pada level perebutan tender dan lisensi saja. Kalaupun lahir perundang-undangan yang tidak berpihak pada buruh saat ini. Saya lebih melihat sebagai kepentingan untuk menarik investasi asing dari pada demi kemajuan kelas pebisnis Tionghoa Indonesia yang nota bene adalah bagian dari kelas menengah. Sebuah kelas yang dielu-elukan yang dapat diandalkan dalam membawa arus perubahan, Refleksi atas revolusi Prancis yang meruntuhkan Feodalisme dan menaikkan kaum

²⁷ Sutrisno Lukman. 1984.(Prisma) *Pergeseran Dalam Golongan Menengah Di Indonesia*. LP3S. hal 27-29.

²⁸ Sutrisno Lukman (1984). *Opini dan Kritik*. PT Gramedia, KPG, Jakarta Hal 53

borjuasi. Pada masa demokrasi terpimpin kita dapat pula melihat ada yang terlibat dalam wilayah politik praktis, pada masa fase selanjutnya mengalami degradasi. Walaupun gambaran bahwa politik adalah hal yang kejam telah dijadikan keyakinan tersendiri.

Runtuhnya dinasti Soeharto menjadikan sebuah fenomena tersendiri²⁹. Ekspresi yang terpendam selama 32 tahun sang raja berkuasa menyebabkan meledaknya kerusuhan yang mengakibatkan dijarahnya serta pengerusakan pada banyak sentra ekonomi, sekali lagi perbedaan suku bangsa menjadi alasan. Gambaran pebisnis Tionghoa yang menganggangi perekonomian negeri ini begitu mengena, menjadi stimulus bagi penyebab kemarahan massa. Pasca kerusuhan dan dilangsungkannya pemilu mengakibatkan naiknya Gus Dur. Sempat terselip harapan dari seluruh komponen bangsa bahwa negeri ini menuju arah kehidupan yang lebih baik. Dihapusnya inpres No 14 tahun 1967 memberikan gairah tersendiri bagi suku bangsa Tionghoa. Tradisi yang dahulu tersimpan rapi dalam lemari mulai bisa dirayakan secara bebas. Ketika kita melihat berbagai daerah di Nusantara dengan berbagai kebudayaan yang warna-warni. Maka sekarang suku bangsa Tionghoa dengan dihapusnya inpres tersebut dapat menyumbangkan karakteristiknya budayanya sebagai khasanah tersendiri. Lain hal dalam bidang politik, reformasi yang bergulir membuat seluruh orang yang pernah terpinggirkan karena sifat membangkangnya mulai menunjukkan taringnya dihadapan publik. Suara kaum minoritas sudah mulai

²⁹ Inilah yang dapat disebut salah satu gerakan kelas menengah yang berhasil dengan nafas independensinya. Runtuhnya Soekarno ditandai kerja sama militer AD dengan mahasiswa tapi

diperhitungkan. Antusiasme ini kelihatannya mulai menggelora, merebak dimana-mana. Pendirian partai politik dan organisasi kebudayaan bernafaskan Tionghoa mulai berjamur walaupun etnik ini ternyata lebih memilih untuk berintegrasi dengan kemapanan partai politik yang sudah ada. Dimulai dengan tradisi budaya Barongsai yang sudah dapat dinikmati seluruh khayalak di seluruh negeri dan sudah bisa diturunkan ke jalan sebagai bentuk partisipasi budaya.

Bisa dikatakan sebagai langkah maju ketika toleransi terhadap keberagaman suku mulai mendapat tempat penting tanpa adanya pemaksaan serta pengkultusan terhadap budaya tertentu. Masalah yang tertinggal dan dipandang paling krusial adalah kesenjangan sosial yang dipandang banyak kalangan justru memainkan peranan paling penting sebagai penyulut berbagai kerusuhan serta mengundang disintegritas bangsa. Bukan sekedar Tionghoanisasi atau peragaan berbagai simbol tapi lebih tepatnya kemiskinan yang seharusnya menjadi musuh utama setiap rakyat negeri ini.

Pasca terbungkamnya suara rakyat, yang cukup mencuat sebagai politisi dari kalangan Tionghoa adalah nama Alvin Lie .Pada karya ilmiah ini penulis mencoba melihat bagaimana partisipasi politik kelas menengah Tionghoa, yang oleh banyak kalangan dinilai kabur dapat menunjukkan dirinya dihadapan seluruh khayalak negeri. Bermula dari pebisnis serta keterlibatannya dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Memutuskan untuk terlibat lebih jauh dalam kancah politik nasional dengan menjadi anggota DPR-RI. Alvin Lie dengan pilihan

dalam politik praktis. Beberapa prestasi politik sedikitnya bisa dilakukan, terutama ketika berhasil menggusur Gus Dur dari kursi nomor satu negeri ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Latar belakang yang dipaparkan diatas merupakan prolog yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosa selanjutnya. Secara ekspilist penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisa partisipasi politik kelas menengah Tionghoa serta berbagai faktor pendukungnya. Atas dasar itu maka masalah utama dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : *Analisa faktor pendukung dan prestasi politik Alvin Lie ?*

C. TUJUAN PENULISAN

- 1. Menggambarkan dan menganalisa prestasi politik Alvin Lie dalam parlemen.*
- 2. Mengetahui apa saja basis penopang politiknya.*

D. LANDASAN TEORI

Untuk menjawab pertanyaan pokok dan sekaligus untuk bisa mencapai tujuan-tujuan penelitian, maka diperlukan kerangka konseptual tertentu. Berturut-turut akan dielaborasi beberapa kerangka pemikiran yang dipandang bisa untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti.

1. Kelas menengah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kelas menengah Indonesia sedikitnya perlu dibahas dahulu apa yang dimaknai sebagai kelas sosial dalam masyarakat. Menurut manifesto komunis "*sejarah semua masyarakat intinya adalah sejarah perjuangan kelas*". Menurut Marx Di bawah kapitalisme masyarakat melibatkan dirinya ke dalam perlawanan dua buah kelas, borjuis dan proletar. Para borjuasi adalah para pemilik modal, pengeksploitasi kelas. Sementara proletar adalah adalah kelas pekerja³⁰. Semakin berkembangnya industri muncul kelas baru yang tidak termasuk didalam keduanya. Biasanya mengidentikan diri sebagai kaum profesional, bekerja sebagai manager dalam perusahaan, bergerak dalam bidang jasa. Perlu untuk dipahami bahwa tiap wilayah memiliki karakternya masing-masing dan akan mempengaruhi strata sosial masyarakat. Di dalam masyarakat dengan ciri khas masing-masing akan membangun model produksi sendiri-sendiri. Mode produksi tidaklah tunggal, karena transformasi sosial yang dirasa berjalan setengah-setengah maka bukan tidak mungkin terdapat beberapa mode produksi dalam tubuh masyarakat. Walaupun tetap ada satu mode dominan di atas mode produksi lainnya. Tinggal

³⁰ W. L. G. ... (2004) ... Hal 47

kita melihat sejauh mana cakupan wilayahnya. Misalnya A menjadi kelompok elit dalam satu wilayah, ketika memasuki wilayah lain bisa menjadi menengah atau bahkan kelas bawah. Interpretasi terhadap teori dalam melihat masalah berelasi dalam konteks kenyataan. Indonesia sebagai negara dunia ketiga berbeda dengan Prancis atau negara lainnya. Sehingga teori pendekatan Eropa paling mungkin hanya dijadikan sebuah rujukan awal untuk melihat dan melahirkan pemikiran orsinil ala Indonesia. Kelas menengah di Indonesia akan sangat berbeda ketika dikomparasikan dengan nenek moyang mereka di Prancis karena berbeda realitas sosial dan strata masyarakat yang juga jelas berbeda.

Menurut Nicos Paulantzas mengemukakan bahwa tidak ada susunan sosial yang hanya menimbulkan dua kelas, tetapi dua kelas utama di setiap susunan sosial adalah kelas –kelas yang berasal dari tata cara produksi yang dominan di dalam susunan yang bersangkutan. Pertama kebanyakan dalam masyarakat mempunyai lebih dari satu tata produksi. Kedua biasanya ada satu tata produksi yang menonjol dan menguasai tata produksi yang lain. Ketiga, setiap tata produksi menghasilkan dua kelompok kelas sosial yakni yang berkuasa (atas) dan yang dikuasai(bawah) dengan demikian dalam suatu masyarakat ada sejumlah pasangan kelas berkuasa atau dikuasai serta atas atau bawah. Keempat, ada kelas atas dari tata produksi yang dominan dan ada kelas atas dari tata produksi yang tidak dominan³¹.

Kelas menengah masih menjadi pembahasan yang kabur. Karena perbedaan yang terjadi antara kelas menengah yang menggulingkan Monarki di

³¹ Paulantzas, Nicos (1980). Kelas dan Revolusi. Lentera Yogyakarta Hal 37

Prancis dengan kelas menengah yang berada di negeri ini. Pada revolusi Prancis kelas menengah yang mendorong perubahan cenderung Independent walaupun pada awalnya kelas menengahpun mengkolaborasikan dirinya dengan kaum feodal. Sementara kelas menengah Indonesia dibesarkan oleh pemerintah . Bahkan dalam kasus dunia ketiga mereka tidak memiliki alat produksi yang massif sehingga untuk mempengaruhi kebijakan secara konsistensi kelas ini cukup lemah. Logika hubungan kelas menengah dengan negara adalah mereka membiayai negara dalam hal membayar pajak. Bahkan sampai pada dana kampanye dalam pemilihan Presiden. Pada kata yang lebih sarkastik adalah tidak perlu menggunakan analisa Marxis yang mendalam dalam memandang kebijakan luar negeri Amerika tapi cukup lihat dalam daftar para penyumbang dana kampanye. Dalam konteks ke Indonesiaan pembahasan lebih jauh mereka terfragmentasi dan heterogen terpecah pada dataran etnisitas agama serta profesi masing-masing Kelas menengah negeri ini belum bisa mengkonsolidasikan kekuatannya dalam kepentingan yang sama sehingga masih terjebak dalam kantung-kantung etnik dan agama. Perlu diperhatikan adalah kemajemukan dari kelas menengah di Indonesia karena struktur sosial yang bisa dikatakan menjadi struktur campuran. Mereka yang dikatakan kelas menengah belum tentu mempunyai gaji, profesi, selera makan dan tingkat pendidikan yang sama. Sebaliknya mereka yang memiliki profesi dan tingkat gaji yang sama juga belum tentu dalam kelas yang sama³².

Dalam melakukan analisa terhadap kelas ini maka lebih mudah apabila kita membedah kelas menengah ini menjadi tiga bagian : kelas menengah atas yaitu para pemilik alat produksi manufaktur, tengah seperti para profesional bergaji dan kelas menengah bawah seperti kaum intelektual. Kelas menengah manufaktur dapat direpresentasikan dengan Medco yang dimiliki oleh Arifin Panigoro. Medco mempunyai hubungan dengan Menteri urusan BUMN Sugiarto yang sebelumnya adalah Direktur Keuangan PT Medco Energy³³. Walaupun kita tidak dapat melakukan judgment mengenai hubungan ini dengan kebijakan pemerintah. Tapi setidaknya dapat sedikit menghubungkan adanya korelasi antara pengusaha dengan penguasa pengambil kebijakan. Bahkan ditengarai Sugiarto masih berkecimpung dalam kelompok usaha Medco. Kelas menengah profesional biasanya adalah para manager perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri yang sedang menanjak kehadirannya. Kelas ini secara mencolok adalah ketika rezim Orde Baru dengan ideologi developmentalismenya dan mengundang para investor untuk terlibat dalam pola pembangunan ala yang berkuasa yaitu pembangunan fisik semata. Dimana-mana terlihat megahnya Jakarta sebagai sentral ekonomi. Sementara jawaban bagi kesenjangan ekonomi tidak pernah tuntas. Kecendrungan yang terjadi adalah mereka mengekor pada para pengusaha yang nota bene adalah bos mereka sendiri.

Kelas menengah intelektual, kelas inilah yang lebih banyak menyuarakan angin perubahan. Pergulatannya dengan buku dan konsep yang diyakini membuat mereka cenderung lebih konsisten dengan dengan ide yang mereka perjuangkan.

Terutama pada level mahasiswa yang kita dapat lihat pada era 98. Bermodalkan bambu serta nyali melawan senjata aparat negara. Tidak dapat dipungkiri adakalanya kelas menengah mengalami inkonsistensi, terutama ketika berhadapan dengan masalah ekonomi. Pilihan lebih condong untuk mempertahankan keamanan ekonomi dibandingkan tetap memperjuangkan ide yang diyakini.

Dalam masyarakat yang mendambakan proses transformasi kelas menengah sering menjadi tumpuan harapan untuk memelopori proses perubahan baik dalam bidang ekonomi, industri, bisnis maupun politik. Mereka sering disebut kreatif minority, yaitu bagian masyarakat yang memiliki persepektif jauh kedepan memiliki banyak informasi (well informed) dan terdidik (well educated). Salah satu karakteristik kelas menengah adalah mengandalkan kemampuan organisatoris (manager), pengetahuan, ijazah, informasi, wacana, dan kewenangan (profesional dan intelektual) atau politik birokrasi (pejabat negara) sebagai aset utama. Tipologi ini digunakan oleh Wright sebagai gambaran bagi pemegang otoritas intelektual yang memiliki kompetensi dalam bidang profesi (bidang pekerjaan) tertentu³⁴.

Mengenai hirarki Aristoteles percaya bahwa posisi kebanyakan orang berada pada suatu tempat diantara kecerdasan tinggi dan rendah, persis seperti kebanyakan kerja manusia yang telah menempatkan mereka di tengah-tengah kemiskinan. Yang menjadi idelisasi Aristoteles ialah adanya masyarakat kelas menengah. Kelas yang mengerti masalahnya sendiri³⁵.

³⁴ Prasetyantoko A(1999). *Kaum Profesional Menentang Rezim Otoriter*. Grasindo. Jakarta Hal 118

Menurut Amilcar Cabral pejuang revolusioner Guine Bissau yang menyoroti kelas dan perjuangan kelas dalam kebanyakan pidatonya yang penting, yang disampaikan kepada konferensi pertama solidaritas rakyat Afrika, Asia, dan Amerika Latin di Havana tanggal 6 Januari 1966. Ia menjelaskan bahwa fenomena kelas berkembang dari tingkat kekuatan produktif dan sistem pemilikan alat produksi dalam suatu proses yang sengaja dan tidak merata tapi semakin meningkat dan kesinambungan imperialisme dapat mempercepat proses ini, tetapi di Guine kapitalisme dibawah kekuasaan Portugis tidak memenuhi misi sejarahnya berupa akumulasi, sehingga kekuatan produksi tidak mencapai tingkat perkembangan yang tinggi ataupun memungkinkan borjuasi nasional atau kelas pekerja yang telah berkembang sepenuhnya. Untuk mengembangkan diri lebih lanjut dalam situasi ini, analisis kelas haruslah memusatkan diri pada peranan borjuasi kecil, yang akan menjadi "satu-satunya lapisan sosial yang mampu memiliki kesadaran mengenai realitas dominasi imperialis dan menangani aparat negara yang diwarisi dari dominasi tersebut. Tidak terlaksananya situasi ini, demikian pendapat Cabral, merupakan suatu kelemahan lain dari gerakan pembebasan nasional karena kesadaran dan pendidikan politiknya, sektor revolusioner borjuasi kecil memegang tampuk pimpinan perjuangan menentang dominasi asing. Peranan ini harus dijalankan oleh sektor pekerja yang sadar beberapa unsur golongan setengah-borjuasi nasional yang diilhami oleh sentimen patriotik. Tetapi borjuasi kecil adalah kelas penjual jasa yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi secara historis, kelas ini tidak memiliki

penguasa dalam masyarakat kolonial atau neo kolonial kemampuan itu terdapat dalam modal imperialis dan kelas pekerja domestik. Jadi borjuasi kecil tidak boleh dibiarkan bertransformasi menjadi setengah borjuasi nasional. Sebaliknya, kelas ini harus berjuang melawan bujukan untuk menjadi borjuis, bergabung dengan revolusi, dan sebagai kelas harus mampu melakukan bunuh diri kelas, untuk dipulihkan hidup sebagai pekerja revolusioner yang sama sekali menyatu dengan aspirasi rakyat yang paling dalam. Disinilah terletak dilema yang dihadapi borjuasi kecil dalam perjuangan pembebasan ; mengkhianati revolusi atau melakukan bunuh diri kelas³⁶.

Benarkah kelas menengah di Prancis sebegitu revolusionernya ataukah hanya sekedar mitos belaka menjadi pembenaran akan kapitalisme kekinian . Benarkah tidak ada ketergantungan diantara kelas feodal di Prancis dengan kelas berpunya tersebut pada awalnya? Ketika kelas menengah tersebut belum memiliki kekuatan untuk menjadi aktor. Mobilitas sosial kerap terjadi. Pandangan bangsawan terhadap borjuasi pada saat itu adalah menjijikan dan lebih rendah. Akibatnya borjuasi mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk bisa membeli gelar dan prestise sosial³⁷. Kekuatan pendobrak baru yang meruntuhkan susunan yang lama itu datangnya dari luar sistem feodal. Yaitu dengan makin meningkatnya produksi untuk pasar dan perdagangan serta dengan datangnya ekonomi uang³⁸.

³⁶ Chilcote H Ronald(1999) *Pembebasan Nasional Menentang Imperialisme*. Sahe Study Club. Dili. Hal 96-98.

Ada dua kategori mengenai kelas menengah ; kelas menengah lama adalah penghasil barang-barang modal(makanan, manufaktur),serta penjualan. Dibawah kapitalisme monopoli fungsi-fungsi ini dijalankan oleh kelas pekerja dibawah manager menengah seperti pengacara, insinyur dari kelas menengah baru ini. Jadi fungsi-fungsi kelas menengah baru ini lebih beragam, manual atau non manual, menyangkut white collar job dan blue collar job. Fungsi lain dari kelas menengah baru adalah terciptanya monopoli modal sebagaimana halnya fungsi negara dalam perkembangan kapitalisme. Sebagai contoh kelas menengah baru bisa muncul karena modal pendidikan yang mereka tempuh. Kelas menengah baru ini bisa bergerak di bidang RD(Research Development), promosi, jasa keuangan, jasa pariwisata, advertising, guru, banking, dosen serta alokasi sumber-sumber ekonomi. Perkembangan kapitalisme dalam masyarakat industri menyertakan sejumlah proses yang membawa tumbuhnya baik manager professional di berbagai sub sector kelas menengah baru. Pertama, kontrol terhadap pekerja untuk memaksimalkan produksi. Kedua, inovasi teknologi dalam produksi agar meraih keuntungan. Ketiga, penyelesaian masalah-masalah yang termasuk dalam proses produksi seperti desain dan promosi. Perkembangan ini membawa over produksi, over konsumsi, yang kemudian menciptakan stagnasi ekonomi sebagaimana yang diramalkan oleh Marx, keempat, legitimasi masalah serta kebutuhan untuk menjamin keamanan dan loyalitas dari massa terhadap kelas menengah baru ini melalui strategi kesejahteraan. Kelima, militerisasi masyarakat(kecuali Amerika Serikat) paling menonjol adalah Jepang, Jerman dan Italia. Di masa perang dunia

orde baru memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menimbun harta dan kuasa melalui jalur-jalur birokrasi negara. Salah satu hasilnya adalah munculnya kelas menengah birokrasi negara. Birokratisasi negara dan pembangunan ekonomi memunculkan kapitalisme patrimonial yaitu kelas yang memiliki akses terhadap kekuasaan yang disebabkan kedekatan terhadap birokrasi patrimonial. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Max Webber seabad silam.

Kategori ketiga, adalah mereka yang menjadi kelas menengah karena tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Mereka menjadi profesional di bidangnya inilah yang yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai kelas menengah baru di Indonesia.

Mereka menjadi kelas menengah baru karena : pertama, ia mempunyai akses yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, kelas menengah baru ini termasuk kelas menengah intelektual yang mempunyai konsep dan pemikiran yang benar-benar modern. Ketiga, kelas menengah baru ini mempunyai kecerdikan dalam merambah akses pada kekuasaan dan mereka melakukan apropriasi terhadap kelas-kelas lain dalam masyarakat³⁹.

2. Empat model Negara, kelas dan nasionalisme ekonomi di kawasan kapitalisme pinggiran.

Analisa terhadap kekuatan sebuah negara serta keberadaan dinamika strata masyarakat didalamnya tidak mungkin dilihat terpisah dengan relasi internasional. Tidak ada Negara yang bias berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan yang lain. Sehingga 4 klasifikasi dibawah ini dirasa bisa menjadi sedikit rujukan untuk

membaca relasi Indonesia dengan dunia internasional serta pengaruhnya terhadap kelas-kelas sosial didalamnya.

a. Negara yang mengalami ketergantungan

Asumsi pokok model ini adalah Negara melayani kepentingan modal asing dalam model ini hubungan antara negara dan modal yang tipikal di Negara maju praktis terbalik. Reproduksi sistem kapitalisme dalam negara kapitalis maju diperlancar oleh hegemoni ideologi kapitalisme. Sementara di kawasan pinggiran partisipasi negara diperlukan untuk menjamin kondisi yang sesuai dengan investasi asing. Dengan demikian negara berperan mengkoordinasikan kelas kapitalis yang lemah agar sesuai dengan ketentuan modal internasional. nasionalisme bersifat mendua dalam hal ini karena fungsi intervensi negara adalah mengabadikan ketergantungan borjuasi nasional terhadap faktor produksi dari luar. Nasionalisme sifatnya hanya ideologis belaka, kedok resmi yang dipakai untuk mengaburkan fungsi obyektif yang disandang Negara. Ideologi seperti developmentalisme digunakan untuk melegalkan otoritarianisme negara. Menyembunyikan fakta bahwa keberadaan negara adalah menjaga kepentingan modal internasional serta mereorganisasi kelas pebisnis agar sesuai dengan prasyarat investasi asing. Ada semacam kekecewaan negara terhadap lemahnya kelas borjuasi nasional.

b. Negara yang nasionalis

Asumsi utama model ini adalah bahwa fungsi ekonomi yang dimainkan negara ditentukan oleh perjuangan kelas. Khususnya kepentingan modal nasional dan internasional yang saling bertentangan. Kelemahan dari borjuasi nasional

memancing Negara untuk melakukan intervensi, karena hanya negara yang dapat menjamin kondisi bagi akumulasi modal. Tetapi negara tetap memiliki otonomi lebih besar bagi kekuatan kelas. Fungsi negara tergantung dari pengaruh politik, dan memungkinkan bagi kapitalisme nasional ketika memiliki pengaruh politik secara efektif untuk merangkul para pejabat negara. Hubungan pribadi kaum kapitalis nasional dapat mengatur kembali arahan kebijakan negara mempercepat akumulasi modal nasional.

c. Negara yang menjalankan internasionalisasi

Posisi strategis negara yang terletak pada keterkaitan antara modal nasional dengan internasional. Keterkaitan tersebut memperbesar otonomi negara. Jika borjuasi yang lemah mendapatkan posisi ekonomi tinggi melalui dukungan negara. Masing-masing kapitalis menjadi berhutang budi pada proteksi negara. Kebangkitan kembali borjuasi nasional menciptakan kebutuhan akan keterlibatan negara yang lebih dalam untuk mengkoordinasikan integrasinya dengan modal nasional. Fungsi inilah yang menyediakan sumber penting bagi pengaruh negara. kontrol terhadap akses pasar dan permohonan investasi asing membuka kesempatan untuk memanipulasi aliansi internasional menurut kriteria yang ditentukan oleh negara hasilnya posisi pengelola negara pada titik temu modal nasional dan internasional ini membuka peluang bagi prakarsa-prakarsa independent dari negara. Menurut Beckman semakin maju bentuk pengurusan keuntungan oleh modal asing semakin besar kebutuhan akan borjuasi domestik yang kuat yang mampu mengelola institusi negara yang kapitalistik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasca 13-14 Mei 1998 kerusuhan rasialis yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik harta maupun jiwa. Diwaktu yang kurang lebih sama lahirlah era pembangunan optimis yang merujuk pada demokratisasi. Era dimana harapan dan mimpi mengenai kebebasan dalam berekspresi lebih terjamin dan terlindungi.

Pada titik tersebut penulisan karya ilmiah ini diajukan untuk menyoroti peran posisi suku bangsa Tionghoa di tengah masyarakat Indonesia. Dibalik balutan ideologi stabilisasi yang kerap menjadi jargon rezim penguasa mengenai toleransi antar suku bangsa mengalami sebuah distorsi tersendiri. Posisi yang pada zaman Soeharto didorong untuk berkiprah terbatas dalam ruang lingkup ekonomi, dibarengi dengan membunuh ruang lain semisal ruang politik, budaya dan militer. Perselingkuhan beberapa aktor dengan negara membuat mereka cukup mempunyai potensi dalam membangun kekuatan ekonomi, bisa dikatakan sangat mengagumkan. Sehingga terbentuk opini publik dan adanya upaya generalisasi sehingga melahirkan sebuah stigma. Bahwa suku bangsa Tionghoa hanya sekedar penguasa bisnis semata melupakan beragam aspek sosial kemasyarakatan, semacam menjadi langkah pembenaran bahwa suku bangsa tersebut adalah borjuasi sebenarnya seperti pada landscape Eropa.

Dalam catatan sejarah, kedatangan suku bangsa Tionghoa cukup sulit untuk ditentukan secara tepat. Diprediksi penyebab utama migrasi keluar adalah akibat dari banjir dan penerangan. Ketidaknyamanan secara politik dengan para

d. Negara untuk Negara

Negara menjalankan peran sebagai pengusaha, semula dalam manajemen, namun kemudian juga dalam kepemilikan usaha produksi. Ketergantungan ekonomi dipandang membalikkan hubungan antara ekonomi dan politik yang tipikal di Negara kapitalis maju. Namun bedanya disini negara memiliki tingkat otonomi yang maksimal mengembangkan basisi materialnya sendiri dan memungkinkan pejabat Negara menentukan kebijakan Negara secara bebas dari hambatan structural. Asumsi pokoknya adalah Negara secara umum berfungsi secara terisolasi dari kekuatan sosial⁴⁰.

3. Prejudice

Sikap negatif yang tidak berdasar diakibatkan karena keterlibatannya pada sebuah kelompok tertentu⁴¹. Bisa untuk dikatakan bahwa prejudice adalah sebuah generalisir dari satu orang terhadap kelompoknya semisal adalah suku bangsa. Ramai di media saat ini, terutama media internasional. Gelombang kebencian terhadap kaum Muslim yang terstigma sebagai teroris. Seolah-olah semua muslim menjadi teroris dan melegalkan pemboman terhadap WTC. Inilah stigma yang terjadi pasca tragedi 11 September. Hal seperti ini juga yang menjadi stigma bagi Tionghoa di Indonesia. Dibayangkan bahwa etnik ini menjadi penanggung jawab atas diskriminasi sosial yang telah begitu mengganga. Benar bahwa beberapa person dari etnik ini menjadi begitu kaya dikarenakan kedekatannya dengan akses kekuasaan tapi hal yang salah ketika menimpakan kesalahan pada etnik secara keseluruhan. Saat ini lebih baik ketika menyebutkan secara nama person yang

⁴⁰ Chalmer Ian.(1996). *Konglomerasi*. Jakarta . LP3S. Hal 48-56.

ditenggarai bertanggung jawab atas kesalahannya. Prasangka tersebut juga dilakukan secara turun temurun sehingga telah membatu didalam pikiran.

4. Modernisasi

Modernisasi politik secara alamiah dimaksudkan untuk mengubah masyarakat terbelakang menjadi maju. Dihadapkan dengan masalah ini aspek paling penting dari modernisasi secara politik dapat dikristaliris dalam tiga kategori utama

Pertama, modernisasi politik melibatkan adanya rasionalisasi kekuasaan, pergantian sejumlah besar pejabat-pejabat politik tradisonal, etnis, keagamaan, kekeluargaan oleh kekuasaan nasional yang bersifat sekuler. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintahan adalah merupakan produk kerja manusia, bukan hakikat alam atau Tuhan sehingga tertib sosial yang baik harus mengandung sumber daya manusia yang tetap sebagai kekuasaan akhir, dan takluk pada aturan hukum positif diatas segala pertauran yang ada. Pembangunan politik membutuhkan tegas kedaulatan eksternal negara bangsa dalam menangkal pengaruh internasional dan kekuasaan domestik pemerintah nasional atas kekuatan-kekauatan lokal dan regional. Artinya, diperlukan integrasi nasional serta sentralisasi akumulasi kekuasaan lembaga-lembaga pembuat hukum nasional yang berwibawa tinggi

Kedua, pembangunan politik melibatkan diferensiasi fungsi politik yang baru dan pengembangan struktur khusus sebagai pelaksanaan seluruh fungsi tersebut. Wilayah kewenangan khusus-hukum, militer, administratif, dan ilmu pengetahuan menjadi kawasan khusus yang terpisah dari dunia politik

dan bersifat mandiri, terspesialisasi namun tetap merupakan lembaga subordinasi dalam melaksanakan semua tugas tersebut. Hirarki administrasi menjadi kian terperinci dan tegas, kompleks, serta lebih disiplin. Jabatan dan kekuasaan didistribusikan dengan bersandar pada ukuran prestasi kerja, bukan askripsi. Ketiga, pembangunan politik ditandai oleh meningkatnya peran serta politik yang meliputi seluruh peran serta masyarakat. Mendalamnya partisipasi di bidang politik ini dapat meningkatkan kadar kontrol penguasa atas masyarakat, seperti pada negara totaliter atau mempertegas pengawasan massa atas pemerintah, seperti dalam sistem demokrasi. Namun dalam semua negara modern warga negara secara langsung terlibat dalam mempengaruhi pemerintahan. Rasionalisasi kekuasaan, differensiasi struktur, dan partisipasi massa, membedakan masyarakat modern dengan masyarakat sebelumnya⁴².

Membaca kelas menengah dan berbagai pergerakan yang dilakukan di negeri ini memiliki perbedaan tersendiri sebagai penggambaran ciri khas masing-masing. Di Prancis musuh utama kelas menengah pada saat itu adalah feodalisme yang direpresentasikan sebagai kekuasaan raja. Sementara sekarang ini perbedaan antara kelas menengah dan elit di negeri ini cukup sulit diperbedakan. Kedudukan kelas menengah adalah para calon elite pengganti kelas elit yang sekarang berkuasa. Modal sosial telah dimiliki sebagai sarana mobilitas keatas sehingga kedudukan bukan hal yang terlalu sulit untuk diraih. Heterogenitas yang dialami oleh kelas menengah membuat terjadinya aliansi longgar diantara mereka.

Perpecahan kepentingan bisa diredam ketika kepentingan diantara mereka bisa dikomunikasikan, sehingga terjadi persamaan persepektif dalam memandang kedepan. Dimasa rezim Soeharto perpecahan kelas menengah disinyalir salah satunya akibat patron klien. Berkiblat kemana pengusaha tersebut dalam membangun jaringan bisnisnya. Tentunya tidak semua pengusaha melakukan hal tersebut. Tetap ada wiraswastawan yang independent tapi jumlahnya sangat sedikit dan jelas tidak mungkin sekaya borjuasi nasional.

Kebangkitan kelas menengah Tionghoa adalah partisipasi politik secara lebih luas. Telah terlihat kelas menengah Tionghoa mengalami pengebirian pada bidang sosial kemasyarakatan. Sehingga kedaulatan mereka tersandera sebagai masyarakat kelas dua di Indonesia. Perjuangan politik menjadi relevan ketika kerusuhan 13-14 Mei terjadi di beberapa kota besar. Kemapanan secara ekonomi nampaknya tidak membuat kesetaraan justru mengundang cibiran dari banyak pihak. Perubahan pemikiran membuat munculnya berbagai organisasi sosial berlandaskan suku bangsa Tionghoa. Tentunya setiap organisasi memiliki cara pandang subyektif masing-masing. Bisa ditarik garis merah diantara semuanya bahwa tujuannya adalah perjuangan kesetaraan non diskriminasi. Alvin Lie sebagai subyek penelitian berkenalan dengan dunia politik tidak sepenuhnya baru. Begitu juga Kwik Kian Gie dari PDI-P. Keduanya boleh dikatakan telah mendapatkan asam garam dari dunia perjuangan politik. Keduanya memiliki tradisi cukup panjang berkenaan dengan keberadaan organisasi mereka. Kebangkitan kelas menengah Tionghoa dipersepektifkan oleh penulis bukan

keberanian untuk kritis. Melakukan counter terhadap masuknya modal asing ke Indonesia. kelas menengah jelas memiliki kepentingan sendiri bukan sekedar menjadi ekor dari keberadaan perusahaan asing ataupun negara. Ada relasi kepentingan antar negara maupun dengan kelas menengah. Sejauh mana kadar pertautan keduanya. Apakah selalu menjadi patron dalam pemberian proyek ataupun terjadi hubungan temporer. Dapat kita lihat dimasa orde baru sebagai surga dari kelas menengah yang notebene adalah para pengusaha papan atas yang sebagian adalah kalangan Tionghoa memperoleh berbagai lisensi dari pemerintah dan mendapat berbagai kemudahan melalui pintu belakang. Tetapi untuk menembuskan kebijakan yang dirasa sangat pro terhadap kepentingannya masih cukup sulit untuk dilakukan. Karena asumsi nasionalisme yang mengebu-gebu keberadaan mereka tetap termarginalkan. Disisi lain mereka adalah patner kerja sama yang dipandang sangat ulet dan memiliki potensi sehingga tidak benar-benar dihancurkan. Tidak hanya kalangan tionghoa yang telah mempunyai kekuatan untuk melakukan ekspansi. Sekarang ini bisa kita lihat borjuasi nasional telah memasuki politik praktis dengan terpilih sebagai penguasa negeri ini. Kelihatannya gejalanya adalah mereka sudah tidak menginginkan kepentingan mereka diwakili dalam parlemen semata. tapi telah menunjukkan diri kepada

E. METODE PENELITIAN

Matode penulisan yang digunakan adalah matode penulisan *deskriptif interaktif*. Dimana dapat didefinisikan bahwa *deskriptif* adalah melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga ataupun masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana yang tampak. Sementara *interaktif* adalah bagaimana peran serta peneliti didalam mewarnai berbagai informasi yang diberikan.

Matode yang digunakan adalah *metode penelitian kualitatif* dengan asumsi dasar bahwa tiap fenomena sosial dan prilaku manusia yang ada pada dasarnya berada dalam pemikiran manusia realitas tersebut terdapat dalam interaksi subyek dengan obyeknya. Akibatnya terdapat banyak realitas sesuai dengan individu yang terlibat didalamnya. Tiap individu berhak untuk membentuk realitas dirinya ataupun realitas sosial menurut pandangannya sendiri dan dengan cara yang berbeda, dalam waktu dan tempat yang berbeda pula. Begner menyatakan bahwa realitas sosial sebagai hasil kehendak manusia secara sadar tak mungkin dapat dipisahkan dari kekhususan hubungan antar manusia yang terlibat. Termasuk para peneliti yang berada didalamnya serta memberikan tafsir realitas yang dihadapinya.⁴³

⁴³ Sutopo H B 2002. *Matode Penelitian Kualitatif ; Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta, Sebelas maret University Pers. Hal 3.

F. SUMBER DATA

1 Narasumber

Biasanya dikenal dengan nama responden, responden biasanya sekedar memberikan tanggapan atas apa yang diminta ataupun yang ditentukan oleh peneliti.

2 Peristiwa atau aktivitas

Data serta informasi juga dapat didapat melalui aktivitas, perilaku dan peristiwa yang dialami oleh nara sumber.

3 Dokumen dan arsip

Merupakan bahan tertulis dari kaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Merupakan sebuah rekaman tertulis.

G. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Tehnik yang akan digunakan dalam penelitian antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Wawancara mendalam

Melakukan wawancara secara mendalam dengan nara sumber untuk mnedapatkan berbagai fakta sehingga dapat dijadikan landasan tulisan.

2 Mengkaji tulisan ataupun arsip(content analisis)

Dokumen tertulis maupun arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti

3. Study Pustaka

Peneliti mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian dimulai dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dituju.

4. Observasi peran aktif

Peneliti sebisa mungkin memainkan peranan secara khusus yang berkaitan dengan penelitiannya. Dengan pertimbangan akses yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk mendapatkan data. Peneliti tidak sekedar bertanya tapi dapat juga mengarahkan peristiwa yang dipelajari demi kedalaman data yang didapat.

H. VALIDITAS DATA

Dalam mencari validitas data menggunakan bentuk Trianggulasi data menurut Patton dapat juga disebut triangulasi sumber, peneliti wajib menggunakan berbagai macam artinya agar kebenarannya dapat lebih teruji apabila memakai berbagai macam sumber data yang tersedia ataupun melakukan pencaharian terhadap berbagai sumber data.